

## IMPLEMENTASI NILAI-NILAI POLITIK ISLAM DALAM DEMOKRASI PANCASILA

Oleh:

Nurmayani<sup>1</sup>

Annisa Zulyani Parinduri<sup>2</sup>

Sarah Aulia<sup>3</sup>

Salsabila<sup>4</sup>

Nashiva Aulia Prastiwi<sup>5</sup>

Universitas Negeri Medan

Alamat: Jl. William Iskandar Ps. V, Kenangan Baru, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten  
Deli Serdang, Sumatera Utara (20221).

Korespondensi Penulis: [nurmayani111161@gmail.com](mailto:nurmayani111161@gmail.com), [annisazulyani22@gmail.com](mailto:annisazulyani22@gmail.com),  
[sarahaulia1411@gmail.com](mailto:sarahaulia1411@gmail.com), [tanjungalsabila171@gmail.com](mailto:tanjungalsabila171@gmail.com),  
[nashivaauliaprastiwi@gmail.com](mailto:nashivaauliaprastiwi@gmail.com).

**Abstract.** *This study examines the integration of Islamic political values into the Pancasila democracy system in Indonesia. The background of this research stems from the reality that Indonesia, as a democratic country with a Muslim majority, faces challenges in balancing religious values and democratic principles. The purpose of this study is to analyze the harmony between Islamic political values such as shura (deliberation), 'adl (justice), amanah (responsibility), and ukhuwah (brotherhood) with the basic principles of Pancasila, and to examine their implications for national political practice. The method used is a qualitative approach with a library study, through the analysis of various scientific literature and relevant documents. The results of the study indicate that Islamic political values do not conflict with Pancasila democracy, but rather enrich the moral and spiritual dimensions in the implementation of democracy. The integration of Islamic values strengthens leadership ethics, increases accountability, and fosters a culture of deliberation and social justice. The implications of this research emphasize that Pancasila democracy is not only a procedural political system, but also a*

Received September 05, 2025; Revised September 26, 2025; October 10, 2025

\*Corresponding author: [nurmayani111161@gmail.com](mailto:nurmayani111161@gmail.com)

# IMPLEMENTASI NILAI-NILAI POLITIK ISLAM DALAM DEMOKRASI PANCASILA

*value system based on morality, religiosity, and humanity. This study is expected to serve as a reference in strengthening character education and political ethics based on Pancasila and Islamic values in Indonesia.*

**Keywords:** *Mandate, Pancasila Democracy, Islamic Politics, Syura, 'Adl.*

**Abstrak.** Penelitian ini membahas integrasi nilai-nilai politik Islam dalam sistem demokrasi Pancasila di Indonesia. Latar belakang penelitian ini berangkat dari realitas bahwa Indonesia sebagai negara demokrasi dengan mayoritas penduduk Muslim menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan nilai-nilai keagamaan dan prinsip demokratis. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis keselarasan antara nilai-nilai politik Islam seperti *syura* (musyawarah), *'adl* (keadilan), *amanah* (tanggung jawab), dan *ukhuwah* (persaudaraan) dengan prinsip-prinsip dasar Pancasila, serta menelaah implikasinya terhadap praktik politik nasional. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi kepustakaan, melalui analisis berbagai literatur ilmiah dan dokumen yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai politik Islam tidak bertentangan dengan demokrasi Pancasila, tetapi justru memperkaya dimensi moral dan spiritual dalam pelaksanaan demokrasi. Integrasi nilai-nilai Islam memperkuat etika kepemimpinan, meningkatkan akuntabilitas, serta menumbuhkan budaya musyawarah dan keadilan sosial. Implikasi penelitian ini menegaskan bahwa demokrasi Pancasila bukan hanya sistem politik prosedural, tetapi juga sistem nilai yang berlandaskan moralitas, religiusitas, dan kemanusiaan. Kajian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam penguatan pendidikan karakter dan etika politik berbasis nilai Pancasila dan Islam di Indonesia.

**Kata Kunci:** *Amanah, Demokrasi Pancasila, Politik Islam, Syura, 'Adl.*

## LATAR BELAKANG

Negara Republik Indonesia merupakan salah satu negara demokrasi dengan penduduk mayoritas Muslim terbesar di dunia. Demokrasi di Indonesia merupakan sistem yang berjalan berlandaskan Pancasila sebagai falsafah dan sumber dari segala sumber hukum tertinggi. Sistem ini dibangun diatas nilai-nilai luhur bangsa yang menempatkan kedaulatan sepenuhnya kepada rakyat. Dalam hal ini, rakyat merupakan sumber legitimasi tertinggi dalam pemerintahan. Kedaulatan ini dilaksanakan menurut

Undang-Undang Dasar, yang menjadi bukti bahwa pemerintahan Indonesia secara tegas menempatkan diri pada prinsip demokrasi karena berlandaskan kedaulatan rakyat (Wahyudiono, 2020). Dengan demikian, demokrasi tersebut bukan hanya sebagai tindakan prosedural, melainkan mengandung moral dan hukum yang dilandaskan pada nilai-nilai Pancasila.

Meski sistem demokrasi juga banyak diterapkan di pemerintahan negara lain, demokrasi yang terjadi di Indonesia berbeda dengan yang lain. Sebab, demokrasi kita diterapkan berdasarkan refleksi dari kepribadian nasional yang mengedepankan musyawarah untuk mencapai mufakat, keadilan sosial, serta harmonisasi antara hak dan kewajiban warga negara. Lebih jauh, demokrasi Pancasila juga merupakan sistem politik yang lahir dari penelurusan terhadap nilai-nilai budaya dan spiritual masyarakat Indonesia yang luhur. Menurut Yunus (2015), demokrasi Pancasila merupakan norma yang mengatur penyelenggaraan kedaulatan rakyat dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, baik politik, ekonomi, sosial, budaya, maupun pertahanan keamanan, yang digali dari nilai masyarakat asli Indonesia.

Jadi, demokrasi tersebut bukanlah hasil adopsi dari sistem politik asing, melainkan hasil kristalisasi dari nilai-nilai luhur seperti gotong royong, musyawarah, dan empati sosial. Berlandaskan hal ini demokrasi Pancasila berperan sebagai jalan tengah antara kebebasan berekspresi individu dan kepentingan bangsa. Untuk itu, keberhasilan dari sistem ini sangat bergantung pada kemampuan masyarakat untuk mengimplementasikan nilai-nilai moral sebagai dasar filosofi hidup.

Sejalan dengan pernyataan tersebut, peran nilai-nilai politik Islam menjadi relevan untuk dikaji berkaitan dengan demokrasi Pancasila. Sejak berdirinya negeri ini, politik Islam sudah mengambil peran dalam dinamika perumusan dan pertahanan kemerdekaan Indonesia. Islam tidak hanya dipahami sebagai agama yang harus dianut, tetapi juga dipakai sebagai pandangan hidup berkaitan dengan seluruh aspek kehidupan. Maula (2019), menjelaskan bahwa dalam perjalanan sejarah Indonesia, hubungan antara Islam dan negara selalu mengalami pasang surut. Pada satu masa, politik Islam dipandang sebagai ancaman terhadap demokrasi dan nilai modernitas, namun pada masa berikutnya, kelompok Islam menjadi lebih akomodatif terhadap nilai-nilai demokrasi dan modernitas tanpa harus meninggalkan identitas keislamannya. Hal ini mengindikasikan adanya transformasi paradigma politik Islam yang lebih terbuka terhadap sistem demokrasi

## IMPLEMENTASI NILAI-NILAI POLITIK ISLAM DALAM DEMOKRASI PANCASILA

Pancasila. Sistem ini kemudian dikenal dengan “post-Islamism”, yakni upaya menggabungkan nilai-nilai religiusitas dan hal-hal masyarakat dalam kerangka politik.

Nilai-nilai politik Islam yang diintegrasikan adalah shura (musyawarah), ‘adl (keadilan), amanah (tanggung jawab), dan ukhuwah (persaudaraan) yang memiliki keselarasan dengan prinsip-prinsip dasar demokrasi Pancasila. Nilai shura tercermin dalam sila keempat Pancasila yang menekankan prinsip “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.” Begitu pula, nilai ‘adl dan amanah berhubungan erat dengan sila kedua dan kelima Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut, nilai-nilai politik Islam sejatinya telah berperan sebagai penguat moral dan etika dalam praktik demokrasi Pancasila yang dilakukan di Indonesia. Hakikat yang diemban demokrasi bukan hanya seputar kebebasan mutlak, melainkan menuntut adanya komitmen untuk membangun citra kebebasan di antara warga negara dalam kerangka penegakan hukum yang absolut. Pandangan ini sejalan dengan prinsip Islam yang menempatkan keadilan dan tanggung jawab sebagai dasar pelaksanaan kekuasaan.

Meski begitu, dalam kajian yang mengulas integrasi nilai-nilai politik Islam dalam praktik demokrasi Pancasila, masih terdapat bias. Sebagian besar literatur memiliki fokus yang lebih terhadap aspek teoretis politik Islam dengan tidak mengkaji bagaimana nilai-nilai Islam yang dibahas tersebut dapat diimplementasikan secara muktahir dalam pengelolaan sistem pemerintahan dan perilaku politik masyarakat Indonesia. Padahal, menurut Maula (2019), Islam memiliki watak holistik yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk kehidupan politik.

Adanya bias tersebut mengindikasikan bahwa perlu dilakukan kajian yang lebih praktis mengenai bagaimana peran nilai-nilai politik Islam dalam menguatkan karakter demokrasi Pancasila. Hal ini relevan dalam menghadapi tantangan globalisasi, pragmatisme politik, dan krisis moral di ruang publik. Oleh sebab itu, kajian ini menjadi krusial dan memiliki nilai aktual dalam ranah demokrasi Pancasila. Melalui analisis yang dilakukan, penelitian ini berusaha untuk menjelaskan bahwa kedua sistem ini tidak bertentangan, sebaliknya berada pada posisi yang saling melengkapi satu dengan yang lain. Keadilan, tanggung jawab, dan musyawarah dalam perspektif Islam dapat memperkuat fondasi etis dalam implementasi demokrasi Pancasila.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi nilai-nilai politik Islam dalam sistem Pancasila democracy di Indonesia, serta mengungkap relevansi nilai-nilai tersebut terhadap praktik politik kebangsaan yang berkeadilan, beretika, dan berlandaskan moralitas keagamaan. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat integrasi antara nilai-nilai religius dan prinsip-prinsip demokrasi dalam kerangka negara Pancasila.

## **KAJIAN TEORITIS**

### **1. Konsep Dasar Politik Islam**

Politik Islam adalah sistem yang berasal dari ajaran Islam yang diintegrasikan untuk mengatur kehidupan masyarakat secara adil dan bermartabat. Menurut Irawan (2025), hakikat politik dalam Islam bukan sekadar perebutan kekuasaan, tetapi merupakan bentuk pengabdian untuk menegakkan keadilan dan kesejahteraan umat. Kekuasaan dipandang sebagai amanah yang harus dijalankan berdasarkan prinsip keimanan dan tanggung jawab moral kepada Allah SWT serta masyarakat.

Pandangan ini didukung oleh sejumlah ahli politik Islam yang menegaskan bahwa tujuan politik Islam adalah untuk membangun tatanan sosial yang menegakkan nilai-nilai keadilan ('adl), musyawarah (syura), dan tanggung jawab (amanah). Ketiga nilai ini dipandang baik karena dapat dijadikan fondasi dalam tindakan-tindakan politik agar kekuasaan yang diberikan pada pemimpin tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Maka dapat disimpulkan bahwa politik Islam memiliki dimensi etis yang menempatkan moralitas dan kemaslahatan sebagai orientasi utama, bukan kekuasaan itu sendiri.

Sejatinya, aspek-aspek dalam politik Islam juga memposisikan manusia sebagai makhluk sosial yang bertanggung jawab untuk menciptakan kehidupan yang nyaman dan damai di lingkungannya. Para pemikir Islam menilai bahwa aktivitas politik merupakan bagian dari ibadah sosial (muamalah), di mana setiap keputusan politik harus dilandasi oleh keikhlasan dan ketakwaan. Dalam hal ini, Irawan (2025) menyatakan bahwa kekuasaan dalam pandangan Islam bersifat khilafah, yakni perwalian terhadap kepentingan umat, bukan dominasi terhadap rakyat.

Selain itu, politik Islam juga bersifat fleksibel karena mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang dinamis namun tetap menjaga nilai-nilai pokoknya

# IMPLEMENTASI NILAI-NILAI POLITIK ISLAM DALAM DEMOKRASI PANCASILA

agar tidak tergerus zaman. Prinsip keadilan, kejujuran, dan persaudaraan menjadi ruh yang harus hadir dalam setiap sistem pemerintahan, baik yang bersifat tradisional maupun modern. Oleh sebab itu, nilai-nilai politik Islam dapat diintegrasikan ke dalam sistem pemerintahan demokratis sebagai dasar moral dalam pengambilan keputusan politik.

Nilai-nilai politik yang dijelaskan diatas, sangat relevan apabila diterapkan di Indonesia. Hal ini dikarenakan politik yang diintegrasikan berdasarkan ajaran Islam, dapat memperkuat konsep demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai tentang keadilan sosial, kemanusiaan, dan moral pemimpin untuk rakyat dapat membantu mempertahankan falsafah hidup bangsa Indonesia. Dengan demikian, politik Islam tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dan negara, tetapi juga berfungsi sebagai sarana untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan duniawi dan tanggung jawab spiritual.

## 2. Konsep Demokrasi Pancasila

Demokrasi pada dasarnya adalah sistem pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi (*popular sovereignty*). Namun untuk pengimplementasiannya di Indonesia sendiri, demokrasi bukan hanya dipandang sebagai sistem yang mengatur kehidupan politik, melainkan juga sebagai sistem nilai yang berlandaskan moral, etika, dan spiritualitas bangsa. Menurut Didik Darmadi (2017), demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang bersumber dari kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Demokrasi ini menolak paham individualisme liberal dan sosialisme totalitarian, serta menempatkan manusia sebagai makhluk individu dan sosial yang harus hidup selaras dalam keadilan dan kebersamaan

## 3. Landasan Filosofis dan Teoritis Demokrasi Pancasila

Secara filosofis, demokrasi Pancasila berakar pada pandangan hidup bangsa Indonesia yang memadukan nilai Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Didik Darmadi (2017) menjelaskan bahwa setiap sila dalam Pancasila memiliki makna politik tersendiri yang menjadi landasan demokrasi bangsa:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung nilai moral dan spiritual yang menjadi pedoman dalam setiap kebijakan politik.
2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab menegaskan bahwa demokrasi Indonesia harus menjunjung harkat dan martabat manusia.

3. Persatuan Indonesia menolak politik yang memecah belah, serta menegakkan semangat nasionalisme dan solidaritas.
4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan menegaskan prinsip deliberatif, di mana keputusan politik diambil melalui musyawarah untuk mufakat, bukan dominasi mayoritas.
5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia menjadi tujuan akhir dari praktik demokrasi, yaitu pemerataan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat.

Dengan demikian, teori demokrasi Pancasila bersifat integratif, karena menggabungkan unsur politik, etika, dan spiritualitas dalam satu sistem nilai yang utuh. Demokrasi tidak dipandang semata sebagai mekanisme kekuasaan, melainkan juga sebagai perwujudan tanggung jawab moral pemimpin terhadap rakyat dan Tuhan.

Demokrasi Pancasila memiliki beberapa prinsip dasar yang membedakannya dari bentuk demokrasi lain, yaitu:

1. Kedaulatan rakyat dalam bingkai moralitas dan hukum. Kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, tetapi penggunaannya dibatasi oleh nilai-nilai Pancasila dan hukum yang berlaku.
2. Musyawarah untuk mufakat. Keputusan politik diambil bukan melalui pertarungan suara mayoritas, tetapi melalui dialog dan pertimbangan moral demi kepentingan bersama.
3. Keadilan sosial. Demokrasi Pancasila tidak hanya menjamin kebebasan politik, tetapi juga menjamin pemerataan ekonomi dan kesejahteraan sosial.
4. Persatuan nasional. Demokrasi Pancasila menolak konflik ideologis dan menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan golongan.
5. Keseimbangan antara hak dan kewajiban. Demokrasi Indonesia tidak memberi ruang pada kebebasan absolut; setiap hak warga negara selalu diiringi kewajiban moral terhadap masyarakat dan negara.

Demokrasi Pancasila berbeda secara mendasar dari demokrasi liberal Barat. Dalam demokrasi liberal, kebebasan individu menjadi nilai tertinggi, sedangkan dalam demokrasi Pancasila, kebebasan dibatasi oleh nilai moral, hukum, dan tanggung jawab sosial. Demokrasi liberal menonjolkan persaingan politik dan kepentingan kelompok, sedangkan demokrasi Pancasila mengutamakan musyawarah, mufakat, dan kepentingan bersama. Dengan demikian, demokrasi Pancasila bukan hanya sistem politik, tetapi juga

# IMPLEMENTASI NILAI-NILAI POLITIK ISLAM DALAM DEMOKRASI PANCASILA

sistem kehidupan bermasyarakat yang berakar pada budaya gotong royong, saling menghormati, dan tolong-menolong.

Demokrasi Pancasila secara parsipatif menempatkan rakyat sebagai tokoh aktif dalam sistem pemerintahan. Pemimpin bukanlah penguasa, melainkan petugas yang melayani rakyat dengan tanggung jawab moral yang bertujuan untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia, yakni memajukan kesejahteraan umum. Oleh karena itu, demokrasi Pancasila menekankan etika kepemimpinan yang bersih, berkeadilan, dan berorientasi pada kemaslahatan rakyat.

Demokrasi ini dibuat untuk menciptakan pemerintahan yang adil, jujur, dan transparan, di mana rakyat memiliki ruang untuk berpartisipasi namun tetap dalam koridor nilai-nilai Pancasila. Demokrasi ini bukan sekadar bentuk politik, melainkan bagian dari cita-cita moral bangsa untuk membangun kehidupan yang berkeadilan sosial dan beradab.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada pemahaman makna, nilai, serta prinsip yang terkandung dalam berbagai literatur yang membahas hubungan antara politik Islam dan demokrasi Pancasila, bukan pada analisis numerik atau pengukuran statistik. Sejalan dengan pandangan Saleh (2017), penelitian kualitatif bertujuan memahami fenomena sosial melalui interpretasi terhadap teks dan konteks, sehingga peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam menafsirkan data yang bersumber dari bahan pustaka.

Desain penelitian bersifat deskriptif-analitis, yang berarti penelitian tidak hanya menggambarkan konsep-konsep yang ditemukan dalam berbagai literatur, tetapi juga menganalisis keterkaitan dan pola hubungan antar konsep tersebut. Melalui proses membaca, menelaah, dan menginterpretasi sumber-sumber ilmiah yang relevan, peneliti berupaya menemukan bentuk integrasi konseptual antara nilai-nilai politik Islam dengan prinsip-prinsip demokrasi Pancasila.

Data penelitian dikumpulkan melalui studi dokumentasi dengan menelaah berbagai karya ilmiah dan literatur yang berkaitan langsung dengan tema penelitian. Dalam hal ini, peneliti berperan sebagai instrumen utama yang aktif dalam menafsirkan

data sesuai dengan konteks dan relevansinya. Data yang dikumpulkan mencakup definisi konseptual, prinsip-prinsip politik Islam seperti *shura*, *'adl*, *amanah*, dan *ukhuwah*, serta nilai-nilai dasar Pancasila seperti kerakyatan, keadilan, kemanusiaan, dan persatuan.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi tiga tahap utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilah dan menyeleksi informasi yang relevan dari berbagai sumber pustaka untuk memfokuskan pada inti penelitian. Tahap penyajian data dilakukan dengan menyusun hasil bacaan dalam bentuk uraian tematik agar hubungan antar konsep dapat dianalisis secara sistematis. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan dengan menafsirkan temuan literatur untuk menemukan bentuk integrasi antara nilai-nilai politik Islam dan prinsip-prinsip demokrasi Pancasila. Sebagaimana dikemukakan Saleh (2017), proses analisis dalam penelitian kualitatif bersifat interaktif dan berlangsung terus-menerus sejak data dikumpulkan hingga diperoleh kesimpulan akhir yang valid dan bermakna.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Integrasi Nilai Politik Islam dalam Demokrasi Pancasila**

#### **a. Prinsip Syura dan Musyawarah dalam Kerangka Demokrasi**

Prinsip *syura* atau musyawarah merupakan salah satu fondasi utama dalam sistem politik Islam yang secara filosofis sejalan dengan nilai-nilai demokrasi Pancasila. *Syura* dalam pandangan Islam tidak hanya diartikan sebagai proses diskusi untuk mencapai keputusan bersama, tetapi juga sebagai wujud tanggung jawab moral dalam memastikan keadilan dan kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan publik. Dalam konteks Pancasila, prinsip ini tercermin secara eksplisit pada sila keempat, yakni “*Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.*”

Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa dalam praktik politik Indonesia, musyawarah telah menjadi mekanisme sosial dan politik yang berfungsi menjaga keharmonisan dan stabilitas nasional. Melalui prinsip musyawarah, perbedaan kepentingan politik dapat diselesaikan tanpa menimbulkan pertentangan yang destruktif. Menurut Maula (2019), hal ini menjadi ciri khas sistem *post-Islamism* di Indonesia, di mana nilai-nilai religius Islam tidak hanya dipertahankan, tetapi juga diintegrasikan secara aktif dalam kerangka demokrasi modern. Dengan demikian, *syura* bukanlah

# IMPLEMENTASI NILAI-NILAI POLITIK ISLAM DALAM DEMOKRASI PANCASILA

konsep eksklusif keagamaan, melainkan etika deliberatif yang menjiwei demokrasi Pancasila.

**Tabel 1.** Keselarasan antara nilai-nilai politik Islam dan prinsip-prinsip Pancasila

| Nilai Politik Islam               | Prinsip Pancasila yang Relevan                                                                       | Implikasi dalam Demokrasi Indonesia                                     |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <i>Syura</i><br>(Musyawarah)      | Sila ke-4: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan       | Mengedepankan konsensus dan mufakat dalam pengambilan keputusan politik |
| <i>'Adl</i> (Keadilan)            | Sila ke-2 dan ke-5: Kemanusiaan yang adil dan beradab; Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia | Mendorong kebijakan yang berorientasi pada kesejahteraan dan pemerataan |
| <i>Amanah</i><br>(Tanggung jawab) | Seluruh sila, terutama sila pertama dan keempat                                                      | Memperkuat integritas moral dan akuntabilitas pemimpin                  |
| <i>Ukhuwah</i><br>(Persaudaraan)  | Sila ke-3: Persatuan Indonesia                                                                       | Menumbuhkan solidaritas dan harmoni sosial antar warga negara           |

Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam memiliki kesesuaian yang erat dengan semangat Pancasila. Dalam praktiknya, *syura* berfungsi memperkuat mekanisme demokrasi deliberatif yang berbasis dialog dan konsensus, bukan dominasi mayoritas. Prinsip ini berimplikasi pada terbentuknya budaya politik yang menekankan etika kebersamaan, penghormatan terhadap perbedaan, serta keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara.

## 2. Nilai *'Adl* dan *Amanah* sebagai Etika Kepemimpinan

Konsep *'adl* (keadilan) dan *amanah* (tanggung jawab) dalam politik Islam menempati posisi fundamental sebagai etika kepemimpinan yang berkeadaban. Kedua nilai ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga menjadi tolok ukur legitimasi moral seorang pemimpin di mata masyarakat. *'Adl* menuntut agar seluruh keputusan politik dan pemerintahan dilandasi pada prinsip keadilan sosial, kesetaraan, dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Sementara itu, *amanah* menekankan bahwa kekuasaan adalah

titipan (trusteeship) yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan akuntabilitas.

Dalam konteks demokrasi Pancasila, kedua nilai tersebut bersinggungan dengan sila kedua dan kelima, yaitu “*Kemanusiaan yang adil dan beradab*” serta “*Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*.” Sebagaimana dinyatakan Didik Darmadi (2017), demokrasi Pancasila menempatkan pemimpin sebagai pelayan rakyat, bukan penguasa yang berhak menentukan segalanya. Dengan demikian, kepemimpinan yang ideal menurut Pancasila dan Islam sama-sama menuntut kesalehan moral, kebijaksanaan, dan tanggung jawab sosial.

Temuan dari kajian pustaka menunjukkan bahwa penerapan nilai *amanah* dalam birokrasi pemerintahan modern dapat memperkuat integritas lembaga publik serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ketika prinsip ‘*adl*’ dijadikan dasar penyusunan kebijakan publik, arah pembangunan nasional akan lebih berpihak pada keadilan distributif dan kesejahteraan sosial. Dengan begitu, nilai-nilai politik Islam berfungsi sebagai pengendali moral dalam sistem demokrasi agar kekuasaan tidak menyimpang dari tujuan utama: kemaslahatan rakyat.

### **3. Keterkaitan Hasil dengan Konsep Dasar dan Penelitian Sebelumnya**

#### **a. Kesesuaian dengan Konsep Teoretis**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai politik Islam secara konseptual tidak bertentangan dengan prinsip demokrasi Pancasila. Sebaliknya, keduanya saling memperkaya dan memperkuat. Irawan (2025) menjelaskan bahwa politik Islam bersifat etis dan bertujuan membangun kemaslahatan umat melalui sistem kekuasaan yang berlandaskan iman, tanggung jawab, dan keadilan. Prinsip tersebut sejalan dengan cita-cita demokrasi Pancasila untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Selanjutnya, Yunus (2015) menegaskan bahwa demokrasi Indonesia merupakan refleksi kepribadian nasional yang berpijak pada nilai religius, moral, dan budaya lokal. Dengan demikian, integrasi antara politik Islam dan demokrasi Pancasila dapat dipahami sebagai perpaduan antara nilai spiritual dan nilai kebangsaan yang menghasilkan model demokrasi khas Indonesia—demokrasi yang religius, humanis, dan berkeadilan.

#### **b. Pertentangan dan Perbedaan Temuan**

# IMPLEMENTASI NILAI-NILAI POLITIK ISLAM DALAM DEMOKRASI PANCASILA

Sebagian pandangan dari literatur Barat, seperti yang dikemukakan oleh Huntington (1996), memandang Islam dan demokrasi sebagai dua sistem yang cenderung bertolak belakang, karena dianggap memiliki perbedaan filosofis dalam memahami kedaulatan dan kebebasan. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan hal yang berbeda. Dalam konteks Indonesia, nilai-nilai Islam justru beradaptasi dengan baik terhadap sistem demokrasi Pancasila melalui pendekatan budaya, spiritualitas, dan moralitas sosial.

Fenomena ini membuktikan bahwa demokrasi Pancasila bukanlah bentuk sekularisme politik, melainkan *demokrasi religius* yang mengakui peran nilai-nilai keagamaan dalam mengatur tatanan politik dan sosial. Perpaduan antara *syura*, *'adl*, dan *amanah* menjadikan sistem demokrasi Indonesia lebih berorientasi pada moralitas publik, bukan sekadar mekanisme prosedural politik.

## 4. Implikasi Teoritis dan Terapan

### a. Implikasi Teoritis

Secara teoretis, penelitian ini memberikan landasan konseptual bagi terbentuknya kerangka etika politik nasional yang berakar pada integrasi nilai-nilai Islam dan prinsip-prinsip demokrasi Pancasila. Integrasi ini memperluas paradigma demokrasi dari yang semula bersifat prosedural menjadi demokrasi yang bermuatan moral dan spiritual. Teori ini menggarisbawahi bahwa konsep *syura* dalam Islam dapat dijadikan model deliberatif khas Indonesia, di mana proses politik tidak semata-mata tentang suara mayoritas, melainkan tentang kebijaksanaan kolektif yang mengedepankan keadilan dan tanggung jawab.

### b. Implikasi Terapan

Dari sisi terapan, penelitian ini memiliki relevansi praktis dalam berbagai bidang. Dalam ranah pemerintahan, nilai *amanah* dan *'adl* dapat dijadikan dasar reformasi birokrasi untuk membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas. Prinsip *ukhuwah* dan *musyawarah* juga penting untuk memperkuat budaya dialog dan kolaborasi antar lembaga serta menjaga harmoni sosial di tengah pluralitas bangsa.

Selain itu, dalam dunia pendidikan, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan dalam penguatan pendidikan karakter berbasis Pancasila. Nilai-nilai *ukhuwah*, *syura*, dan *amanah* dapat diintegrasikan ke dalam kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan untuk membentuk generasi yang berakhlak, beretika, dan demokratis. Implementasi nilai-nilai

tersebut bukan hanya mendukung pembangunan politik yang sehat, tetapi juga memperkuat moralitas publik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa nilai-nilai politik Islam memiliki kesesuaian yang kuat dengan prinsip demokrasi Pancasila. Nilai *syura* (musyawarah), *'adl* (keadilan), *amanah* (tanggung jawab), dan *ukhuwah* (persaudaraan) dapat memperkuat pelaksanaan demokrasi yang beretika, berkeadilan, dan bermoral. Prinsip-prinsip tersebut menegaskan bahwa politik dalam pandangan Islam bukan hanya urusan kekuasaan, tetapi juga bentuk tanggung jawab untuk menegakkan keadilan sosial dan kemaslahatan bersama.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa demokrasi Pancasila bukanlah demokrasi sekuler, melainkan demokrasi yang berlandaskan nilai moral, keagamaan, dan kemanusiaan. Integrasi nilai-nilai Islam di dalamnya menjadikan sistem politik Indonesia lebih seimbang antara kebebasan dan tanggung jawab sosial. Dengan demikian, keduanya saling melengkapi dalam membangun tata pemerintahan yang berkeadilan dan beradab.

Secara praktis, hasil kajian ini dapat menjadi pedoman dalam pembinaan moral aparaturnegara dan pendidikan karakter berbasis Pancasila. Nilai *amanah* dan *'adl* dapat diterapkan dalam reformasi birokrasi agar pemerintahan lebih jujur dan bertanggung jawab. Penelitian ini masih terbatas pada kajian pustaka, sehingga penelitian selanjutnya disarankan untuk melibatkan studi lapangan agar dapat menggambarkan penerapan nilai-nilai politik Islam dalam praktik demokrasi secara lebih nyata.

## DAFTAR REFERENSI

- Darmadi, D. (2022). *Konsep Demokrasi Pancasila Dalam Perspektif Tafsir Al-Qur'an* (Doctoral dissertation, Institut PTIQ Jakarta).
- Irawan, D., & Tohir, A. (2025). Konsep Harokah Islamiyah dalam Politik Islam. *Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII)*, 3(1), 43-50.
- Maula, B. S. (2019). Post-Islamisme Dan Gerakan Politik Islam Dalam Sistem Demokrasi Indonesia. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, 9(1), 90-116.

## IMPLEMENTASI NILAI-NILAI POLITIK ISLAM DALAM DEMOKRASI PANCASILA

- Rahmadani, M. N., Jalili, I., & Miinudin, M. (2025). Implementasi Perbedaan Sistem Politik Berlandaskan Pancasila Dan Sistem Politik Islam Di Indonesia. *Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE)*, 4(4), 1187-1192.
- Rasyid, F. A. (2014). DASAR-DASAR POLITIK ISLAM (Upaya Membangun Paradigma Ilmu Politik Islam). *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, 8(2), 267-284.
- Saleh, S. (2017). *Analisis data kualitatif*. Bandung: Pustaka Ramadhan.
- Su'adah, F., & Royhan, A. (2024). Implementasi UU Demokrasi dan Nilai-Nilai Urgensinya dalam Politik Islam di Indonesia. *Syariah: Journal of Fiqh Studies*, 2(2), 83-108.
- Wahyudiono, T., & Muna, F. R. (2023). Historis Negara Demokrasi Pancasila. *Islamic Law: Jurnal Siyasah*, 8(02), 77-96.
- Yunus, N. R. (2015). Aktualisasi Demokrasi Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. *Sosio Dialektika*, 2(2), 156-166.